

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan). Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan					
1.1	Indikator 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8-9%	8-9%	8-9%*	100%
1.2	Indikator 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,7%	21,7%	23,64%*	108,94%
1.3	Indikator 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,07%	13,22*	101,15%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,27%**	8,27%**	10,26%*	80,60%
2.2	Indikator 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,7 hari**	1,7 hari**	1,32 hari	120%
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	57,25	57,25	66,64	116%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3	100%

V	Sasaran Program 5. Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,43	100%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	85%	85%	100%	117,65%

Keterangan:

*) Nilai merupakan proyeksi capaian

**) Target merupakan nilai maksimal

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program: Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

- 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

$$= (\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital} : \text{Nilai Produk Domestik Bruto}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8-9%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.1 sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8-9%	8-9%*	100% (Memuaskan)

Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi

Berdasarkan data Bank Indonesia dalam buku laporan PTBI Tahun 2025, diperoleh nilai realisasi "*Digital Payment*" sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp78.563,1 Triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 10,8%. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk membantu ekonomi digital ditempuh melalui program-program infrastruktur pembayaran (*retail, wholesale, data*), penguatan industri, pengembangan inovasi, kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel penting untuk kemudahan bertransaksi sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang lebih murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) perlu terus dikembangkan, termasuk eksperimentasi penerbitan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dan Aset Keuangan Digital (tokenisasi aset). Kerja sama antarnegara dalam sistem pembayaran digital, termasuk konektivitas infrastruktur pembayaran (ritel dan *wholesale*), perlu terus dijalin dan diperluas.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Agustus 2025(*), Indonesia menjadi negara dengan penjualan *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan nilai total penjualan neto sebesar US\$64 miliar. Lebih lanjut lagi, Bank Indonesia memprediksi nilai transaksi *e-commerce* tumbuh 3,3%, dari semula Rp487 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp503 triliun pada tahun 2025. Ini menunjukkan posisi Indonesia kuat dalam pasar *e-commerce* regional, baik dari sisi skala maupun adopsi digital oleh konsumen dan pelaku usaha.

Selain itu, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB tahun 2025 (target 8-9%) di-*cascading non-direct* dari unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan target jumlah volume transaksi *e-commerce* tahunan sebesar 2,4 dan target triwulanan sebesar 0,6 miliar faktur transaksi. Sampai dengan Triwulan IV 2025 ini, nilai realisasi sementara sebesar 2,73 miliar faktur transaksi atau mencapai 120% dari target tahunan sebesar 2,4 miliar faktur transaksi (Data

Bank Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025). Data ini masih sementara, mengingat Bank Indonesia merencanakan penerbitan data Triwulan IV Tahun 2025 pada akhir bulan Januari 2026 mendatang. Dalam mendukung hal tersebut, unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital aktif melakukan koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa koordinasi informal terkait metodologi yang digunakan untuk pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Adapun diskusi dilakukan dengan melibatkan Prof. Babacan, dan instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, formulasi perhitungan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (target 8-9%) ini secara konkret belum ada dan masih dalam perumusan antar Kementerian/Lembaga (BPS dan Kementerian PPN/Bappenas). Meskipun kontribusi spesifik ekonomi digital terhadap PDB belum dirinci secara resmi, beberapa indikator menunjukkan peran penting sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional pada Triwulan III 2025 memperlihatkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,04% (year-on-year), mencerminkan stabilitas dan daya tahan ekonomi domestik. Di samping kontribusi sektor tradisional seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, ekonomi digital memainkan peran penopang penting.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Terlaksana	Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dengan melakukan diskusi bersama Prof. Babacan dari Australia
Triwulan II			
1	Penyelesaian isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Terlaksana	1. Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/42/D.III.M.E KON.5/04/2025 tertanggal 14 April 2025 Perihal Tanggapan Atas Masukan Idea Terhadap RPKM PMSE yang diselenggarakan pada 17 April 2025. Ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:KWU.06.02/04/D.III.M.E KON.5/04/2025 pada 17 April 2025;

			2. Koordinasi pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.01/73/D.III.M.E KON.5/06/2025 tertanggal 20 Juni 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula Rapat B/KWU.06.01/42/D.III.M.EK ON.5/06/2025 tertanggal 23 Juni 2025
Triwulan III			
1	Monitoring dan Evaluasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Terlaksana	1. Undangan Asdep Pengembangan Ekonomi Digital Nomor : KWU.06.01/91/D.III.M.EKON .5/07/2025 tanggal : 22 Juli 2025 Hal : <i>Kick Off</i> Pembahasan Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Event dan Business Matching</i> pada <i>4th Global Digital Trade Expo (GDTE) 2025</i> 2. Nota Dinas Asdep Pengembangan Ekonomi Digital Nomor : KWU.06.02/90/D.III.M.EKON .5/07/2025 Hal : Laporan Rapat <i>Kick Off</i> Pembahasan Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Event dan Business Matching</i> pada <i>4th Global Digital Trade Expo (GDTE) 2025</i>
Triwulan IV			
1	Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi High Level Meeting Isu/Permasalahan terkait <i>E-Commerce</i>	Terlaksana	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu permasalahan <i>e-commerce</i> dilaksanakan dalam agenda: 1. Penyelenggaraan Perundingan DEFA ke-14 di Jakarta pada tanggal 7-10 Oktober 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta. 2. Pelaksanaan <i>relay</i> perundingan DEFA ke-14 melalui Undangan Nomor KWU.06.01/113/D.III.M.EKO N.5/09/2025 pada 18 September 2025. 3. Narasumber dan menugaskan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sebagai <i>exhibitor</i> pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI x IFSE) pada tanggal 30 Oktober - 1 November 2025.

			4. Melaksanakan koordinasi diskusi Hasil Indeks Daya Saing Digital Indonesia di Tingkat Global. No: KWU.06.01/136/D.III.M.EKO N.5/11/2025 pada 10 November 2025. 5. Rapat Koordinasi terkait Pengembangan <i>Gig Economy</i> sebagai Pendukung Paket Kebijakan Ekonomi Nasional No: KWU.06.01/141/D.III.M.EKO N.5/11/2025 pada 17 November 2025. 6. Melaksanakan koordinasi diskusi dukungan <i>program Support to Consumer Protection, Competitiveness and SMEs in ASEAN (SUCCESS)</i> No: KWU.06.01/149/D.III.M.EKO N.5/12/2025 pada 10 Desember 2025. 7. Rapat Finalisasi Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB No: KWU.06.01/152/D.III.M.EKO N.5/12/2025 pada 15 Desember 2025. 8. Melaksanakan koordinasi diskusi Proyek Strategis Nasional Pusat Data Nasional No: KWU.06.01/156/D.III.M.EKO N.5/12/2025 pada 15 Desember 2025. 9. Memberikan masukan atas Draft <i>MoU Economic Growth Partnership (EGP)</i> RI-Inggris sebagaimana Nota Dinas Nomor: KSI.02.01/ 134 /D.III.M.EKON.5/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.
2	Monitoring dan Evaluasi Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i> sebagai Proyeksi Pengukuran Ekonomi Digital terhadap PDB	terlaksana	Monitoring dan Evaluasi Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i> sebagai Proyeksi Pengukuran Ekonomi Digital terhadap PDB dilaksanakan melalui: 1. Telah dilaksanakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi melalui ND nomor: PH.02.02/139/D.III.M.EKO N.5/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tentang Tim Koordinasi Perumusan Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekodig terhadap PDB. 2. Rapat Finalisasi Metodologi Pengukuran Kontribusi

			Ekonomi Digital terhadap PDB No: KWU.06.01/152/D.III.M.EK ON.5/12/2025 pada 15 Desember 2025.
3	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026		Telah dilaksanakan perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026 pada tanggal 15 Desember 2025 di Ruang Rapat Loka 2, Gedung Ali Wardhana yang dihadiri oleh Tim Kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital bersama Sekretariat Deputi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Kementerian/Lembaga terkait:

1. Membuat *timeline* target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
2. Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi *e-commerce*.
3. Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa (checklist) rencana yang telah disusun.
4. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu dalam draft ASEAN DEFA yang belum berhasil disepakati.
5. Menghadiri kegiatan pembahasan *draft* DEFA yang diselenggarakan oleh K/L atau instansi lainnya.
6. Mengikuti *capacity building* ASEAN DEFA untuk memiliki kesepahaman, kesiapan dan kapabilitas negara ASEAN terkait aspek yang dibahas.
7. Mengidentifikasi inisiatif strategis yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
8. Menghadiri kegiatan terkait pilar-pilar yang ada dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (Stranas Ekodig) 2030, seperti pembahasan peta jalan pengembangan semikonduktor dan AI.
9. Rapat Tindak Lanjut *Kick Off Roadmap* Infrastruktur Digital sesuai undangan No: KWU.06.01/127/D.III.M.EKON.5/10/2025 pada 15 Oktober 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penurunan daya beli dan inflasi sektoral dimana terdapat perlambatan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan tarif PPN dan inflasi harga barang pokok. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan *e-commerce* yang diproyeksikan melambat karena konsumen yang cenderung lebih selektif dan memprioritaskan kebutuhan primer daripada belanja untuk gaya hidup digital.
2. Ketidakpastian global yang dimana investasi *startup* melambat dengan tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik menyebabkan aliran modal ke startup teknologi lokal berkurang serta berdampak pada penurunan inovasi dan ekspansi sektor digital.
3. Kecepatan median internet seluler Indonesia tergolong tertinggal di kawasan ASEAN akibat keterbatasan infrastruktur digital. Akses *fixed broadband* masih terbatas dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan, dengan biaya yang relatif tinggi dibandingkan negara tetangga. Selain itu, kapasitas pusat data nasional masih tertinggal, yang diperparah oleh

proses perizinan yang panjang serta keterbatasan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti:

1. Pemerintah perlu melakukan pemberian kompensasi berupa insentif pajak atau retribusi yang lebih ringan bagi platform digital yang memprioritaskan penjualan produk UMKM lokal terutama yang memasarkannya melalui digital sehingga mampu mengimbangi beban PPN 12%.
2. Untuk menciptakan kemandirian pendanaan dan menjaga daya tarik investasi di tengah ketidakpastian geopolitik pemerintah perlu mendorong partisipasi lembaga terkait serta investor institusi lokal untuk mengisi kekosongan modal yang ditinggalkan investor asing.
3. Melakukan koordinasi percepatan pembangunan dan pemerataan konektivitas broadband dengan optimalisasi dan perluasan jaringan fixed *broadband* melalui kemitraan pemerintah dan swasta untuk menurunkan biaya layanan, serta penguatan kapasitas infrastruktur digital dengan mendukung pusat data nasional sebagai proyek strategis nasional.

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan tool untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Pengukuran kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kontribusi Nilai Ekspor Barang dan Jasa Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) = ((Nilai Ekspor Barang ± Nilai Ekspor Jasa): Nilai Produk Domestik Bruto) x 100%

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 21,7%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.2 sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,7%	23,64%*	108,94%

Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada triwulan III tahun 2025

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2025 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB pada Triwulan IV Tahun 2025 yang telah dirilis pada bulan November 2025.

Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 23,64% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp1432410,9 miliar dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp6.060.037,40 miliar. Dari proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Triwulan IV diperkirakan minimal sebesar 23,64%, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 108,94% yang didapat dari persentase realisasi triwulan IV dibanding dengan target triwulan IV.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan

1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan bentuk rapat koordinasi dan FGD dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 13 Januari 2025 (Kemendag) 2. 14 Januari 2025 (Kemendag) 3. 15 Januari 2025 (Kemendag) 4. 3 Februari 2025 (Kemendag) 5. 21 Januari 2025 (Kemendag) 6. 24 Februari 2025 (Kemendag)
2	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 3 Februari 2025 (Zoom) 2. 25 Februari 2025 (Zoom)
Triwulan II			
1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan monev dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal 11 Juni 2025.
Triwulan III			
1	Koordinasi Evaluasi Implementasi Pelaksana dan Kelompok Kerja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional	Tertunda dan Digeser	Koordinasi Evaluasi Implementasi Pelaksana dan Kelompok Kerja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional tertunda ke TW-IV 2025.
Triwulan IV			
1	Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No. 8 Tahun 2024	Terlaksana	Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No. 8 Tahun 2024 sudah terlaksana pada triwulan II (6 Mei 2025).
2	Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023	Terlaksana	Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan dan matriks rencana revisi Permendag Nomor 23 Tahun 2023.
3	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekspor Tahun 2026	Terlaksana	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekspor Tahun 2026 dilaksanakan melalui penguatan tim Satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah) yang dilaksanakan melalui beberapa rapat koordinasi pada triwulan IV.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Pada Triwulan IV ini juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan lain untuk menunjang capaian kinerja, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat nomor PI.02.01/25/D.III.M.EKON.3/10/2025.

2. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perkembangan Isu Ekonomi dan Perdagangan antara Indonesia dan India sesuai undangan Nomor PI.02.02/28/D.III.M.EKON.3/10/2025.
3. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Workshop Pemanfaatan GTAP sesuai undangan Nomor PI.02.02/32/D.III.EKON.3/10/2025.
4. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perkembangan Implementasi Tahap I dan Tindak Lanjut Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat Nomor PI.02.01/35 D.III.M.EKON.3/12/2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya kebijakan tarif AS dikhawatirkan menyebabkan penurunan daya saing dan volume ekspor produk Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.
2. Terjadinya fenomena *frontloading* ekspor ke AS yang mana eksportir mempercepat pengiriman untuk menghindari tarif baru.
3. Melemahnya permintaan global dimana negara-negara mitra dagang utama mengalami perlambatan yang akan menghambat laju ekspor secara keseluruhan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong pengembangan dan produksi bahan baku serta komponen penolong di dalam negeri, penguatan insentif fiskal dan proteksi impor.
2. Penguatan stimulus fiskal dan kebijakan ekonomi.
3. Penguatan promosi seperti pameran dagang internasional, misi dagang dan promosi digital yang lebih terarah, serta mempercepat negosiasi dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan dengan usaha akses Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan tarif yang lebih rendah.

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.

Pengukuran kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan

besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB

= (Nilai perdagangan besar dan eceran/nilai PDB) * 100%

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 13,07%. Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun. Capaian IKU 1.3 sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,22%*	101,15%

Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada triwulan III tahun 2025

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan IV Tahun 2025 belum diketahui karena jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Januari/awal Februari 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB Triwulan III Tahun 2025 yang telah dirilis pada November 2025. Merujuk pada realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 13,22% dan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 13,04%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan IV tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 13,22%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 101,15%.

Data yang terdapat pada BPS masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi, Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDB Kategori G1 dan G2 ke BPS, namun data tersebut belum didapat sampai laporan ini disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2025 sesuai surat undangan PI.04.02/02/D.III.M.EKON/02/2025
2	Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat (BINA dan Launching Friday Mubarak)	Terlaksana	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Press Conference dan Launching BINA Lebaran sesuai surat undangan PI.04.02/04/D.III.M.EKON.02/03/2025
Triwulan II			
1	Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera
2	Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	Terlaksana	5. Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan di Pulau Sumatera. 6. Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Back to School di Pulau Sumatera
Triwulan III			
1	Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	1. Rapat Pembahasan Pelatihan idEA e-UMKM di Kota Yogyakarta dan Pembahasan Dukungan HIPINDO dan APRINDO pada Jogja Great Sale sesuai Surat Nomor PI.04.02/36/D.III.M.EKON.2/08/2025. 2. Rapat Pembahasan Draft Kepmenko tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN sesuai Surat Nomor PI.04.02/37/D.III.M.EKON.2/08/2025. 3. Rapat Koordinasi Program GASPOL kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Usulan Program GASPOL menjadi bagian dari RB Tematik.

2	Tindak Lanjut Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	Terlaksana	1. Rapat Koordinasi Pembahasan Gerakan ASN Pakai Produk Lokal sesuai Surat Nomor PI.04.02/32,34,33,34/D.III.M.EKON.2/08/2025. 2. Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kick-off Road to HARBOLNAS sesuai Surat Nomor PI.04.02/39/D.III.M.EKON.2/08/2025.
Triwulan IV			
1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Penyelesaian Kendala Capaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025.
2	Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	Terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025.
3	Perencanaan Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2026	Terlaksana	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional tanggal 15 Desember 2025.

Pada Triwulan IV ini juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang kinerja, diantaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasionalisasi Program GASPPOL kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 19 September 2025.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Usulan Program GASPPOL menjadi bagian dari RB Tematik tanggal 19 September 2025.
3. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tingkat Menteri dalam rangka mendukung Gerakan ASN Pakai Produk Lokal tanggal 16 Oktober 2025.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional tanggal 15 Desember 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Meskipun ada peningkatan bantuan sosial dan stimulus akhir tahun, kenaikan harga komoditas (terutama makanan, minuman, dan tembakau) dapat menggerus daya beli riil masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah. Hal ini menjadi permasalahan krusial karena sektor perdagangan bergantung pada konsumsi rumah tangga.
2. Pergeseran preferensi konsumen ke *platform* digital (*e-commerce*) mengubah struktur perdagangan eceran. Perdagangan eceran konvensional menghadapi tantangan adaptasi dan persaingan harga dari penjualan daring (*online*).

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong program belanja nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, ritel juga didorong untuk dapat lebih melibatkan produk UMKM dalam program belanja.
2. Penguatan koordinasi program pengembangan UMKM digital yang tersebar di berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya.

2

Sasaran Program: Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
- 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Latar Belakang

Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari:

- Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel
- Biaya Jasa Penunjang Angkutan
- Biaya Jasa Angkutan Laut
- Biaya Jasa Angkutan Udara
- Biaya Jasa Pos dan Kurir
- Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Jasa Angkutan Rel

Pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB bertujuan Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB

$$= (\text{Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB}) * 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8,27%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 2.1 sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target* TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,27%*	10,26%**	80,60%

Keterangan:

*) Target merupakan nilai maksimal

**) Angka realisasi merupakan proyeksi

Target biaya transportasi logistik terhadap PDB tahun 2025 adalah 8,27% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya.

Sampai dengan laporan ini disusun, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB triwulan IV tahun 2025 belum diketahui mengingat rilis data PDB Nasional Lapangan Usaha triwulan IV belum terbit dan diperkirakan akan rilis pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Proyeksi triwulan IV tahun 2025 menggunakan realisasi triwulan III tahun 2025.

Biaya transportasi logistik/Biaya Logistik Nasional (BLN) terdiri dari biaya transportasi logistik darat dan laut yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan sudah diumumkan secara tertutup pada triwulan IV 2025 untuk BLN 2022 dengan menggunakan basis IO 2016, sedangkan untuk BLN 2023-2024 menggunakan basis IO 2020.

Realisasi triwulan III didorong oleh penyelesaian RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang berisikan 3 (tiga) strategi yang menyasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik. Oleh karena itu, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB pada Triwulan IV diperkirakan minimal dapat mencapai 10,26%, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 80,60%.

Pada tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut: (i) Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik; (ii) Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; dan (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja logistik nasional dalam indikator kinerja logistik global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa RPerpres Penguatan Logistik Nasional terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, melalui antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan rapat-rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan RPerpres tersebut. Sejauh ini tiga menteri, yakni Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, serta Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan dan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Sekretaris Negara, sementara proses finalisasi masih menunggu paraf dari Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 23 Januari 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional.
Triwulan II			
1	Penyelesaian isu/permasalahan terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 16 April 2025 dan serangkaian Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II tahun 2025 secara bilateral dalam rangka pembahasan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional. Per tanggal 19 Juni 2025, Renaksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.
Triwulan III			
1	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standardisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dilaksanakan dengan Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Strategi Efisiensi Logistik untuk Mendukung Ekspor dari Wilayah Timur Indonesia tanggal 30 September 2025.
Triwulan IV			

1	Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring <i>High Level Meeting</i> Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan <i>High Level Meeting</i> Pembahasan <i>Mapping and Modelling Domestic Freight Flow</i> di Indonesia dengan National University of Singapore tanggal 19 November 2025 dan Pembahasan Lanjutan Kajian Strategi Efisiensi Logistik tanggal 14 November 2025.
2	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Logistik Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan dialog kinerja pembahasan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 pada 27 November 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 1 Oktober 2025;
2. Rapat Koordinasi Lampiran RPerpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 4 November 2025;
3. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL tanggal 6 Oktober 2025;
4. *Focus Group Discussion* (FGD) Pemanfaatan Kode Pengiriman Penyelenggaraan Pos tanggal 9 Oktober 2025;
5. Rapat Evaluasi Angkutan Barang tanggal 11 November 2025;
6. Diskusi Finalisasi Penghitungan Biaya Logistik Nasional Tahun 2023 dan 2024 tanggal 6 November 2025;
7. Rapat Koordinasi Hasil Perhitungan Biaya Logistik Nasional Tahun 2023 dan 2024 tanggal 9 November 2025;
8. Rapat Finalisasi Pembahasan Revisi Permendag No. 53/2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
9. Rapat Penyusunan Langkah Strategis Akses Industri dalam Negeri ke Saudi Arabia dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 26 November 2025;
10. Rapat Pembahasan ASEAN – Hong Kong, China FTA (AHKFTA) *Economic and Technical Co-operation* (ECOTECH) *Work Programme* 2026 pada 13 November 2025;
11. Rapat Tindak Lanjut Signing ASEAN-China Free Trading Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol pada 13 November 2025;
12. The 111th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and The 38th Logistics and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG) Meeting tanggal 7-8 November 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang mana didalamnya berisikan renaksi terkait konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat dan laut, karena proses birokrasi di K/L yang bertanggung jawab untuk melakukan paraf draf Perpres cukup lambat dan panjang.

2. Terjadinya efisiensi anggaran di K/L terkait sehingga koordinasi beberapa rencana kebijakan sulit untuk diimplementasikan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Monitoring berkala ke PIC masing-masing K/L agar dapat mempercepat proses paraf di internal K/L.
2. Perubahan pelaksanaan rencana rapat koordinasi yang sebelumnya fisik menjadi melalui media daring.

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Latar Belakang

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pengukuran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan bertujuan memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT)

= (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal

Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok

= Σ Rata-rata TT Seluruh Bulan : 12

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan Tahun 2025 adalah sebesar 1,7 Hari. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga triwulan IV tahun 2025, Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan yang telah terealisasi sebesar 1,32 Hari atau mencapai 120% dari target tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Persentase	1,7 Hari	1,32 Hari	120%

*) Target merupakan nilai maksimal (satuan hari = 24 jam)

Target rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2025 adalah 1,7 hari yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin cepat waktu perputaran berarti semakin baik kinerjanya. Realisasi triwulan IV tahun 2025 adalah 1,32 hari dari target 1,7 hari atau berhasil mencapai kinerja 120%.

Pada tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kebijakan Pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional, serta Kebijakan Penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Indikator kinerja logistik internasional yang akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time at Port*; (ii) *Container indicator: Container Dwell Time Import & Export*; (iii) *Container Indicator: Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) *Postal indicator: Postal Delivery Time Import*; (vi) *Airport indicator: Aviation Dwell Time Import*;

Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) *Inter-Island indicator: Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

sebagai berikut.

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 23 Januari 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional.
Triwulan II			
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Terlaksana	Telah diselenggarakan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan indikator pelabuhan dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 8 Mei 2025.
Triwulan III			
1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi	Terlaksana	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standardisasi Fasilitas

	Standardisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas		Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dilaksanakan dengan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 18 Juli 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional.
Triwulan IV			
1	Monitoring Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Terlaksana	Telah diselenggarakan Rapat Monitoring Evaluasi Digitalisasi Pelabuhan pada tanggal 16 Desember 2025 dalam rangka membahas <i>end-to-end</i> digitalisasi di pelabuhan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 1 Oktober 2025.
2. Rapat Koordinasi Lampiran RPerpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 4 November 2025.
3. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL tanggal 6 Oktober 2025.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) Pemanfaatan Kode Pengiriman Penyelenggaraan Pos tanggal 9 Oktober 2025; Rapat Evaluasi Angkutan Barang tanggal 11 November 2025.
5. Diskusi Finalisasi Penghitungan Biaya Logistik Nasional Tahun 2023 dan 2024 tanggal 6 November 2025.
6. Rapat Koordinasi Hasil Perhitungan Biaya Logistik Nasional Tahun 2023 dan 2024 tanggal 9 November 2025.
7. Rapat Finalisasi Pembahasan Revisi Permendag No. 53/2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
8. Rapat Penyusunan Langkah Strategis Akses Industri dalam Negeri ke Saudi Arabia dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 26 Nov 2025.
9. Rapat Pembahasan ASEAN – Hong Kong, China FTA (AHKFTA) *Economic and Technical Co-operation* (ECOTECH) *Work Programme* 2026 pada 13 November 2025.
10. Rapat Tindak Lanjut Signing ASEAN-China Free Trading Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol pada 13 November 2025.
11. The 111th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and The 38th Logistics and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG) Meeting tanggal 7-8 November 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terjadinya peningkatan arus barang pada akhir tahun menyebabkan kebutuhan ketersediaan jumlah armada transportasi dan tenaga kerja meningkat.
2. Lamanya *dwelling time* pada proses pra-pelayanan (dokumen perizinan) dan peningkatan pemeriksaan fisik (*random check*) bongkar muat.

3. Keterlambatan penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional karena proses birokrasi di K/L yang bertanggung jawab untuk melakukan paraf draf Perpres cukup lambat dan panjang.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Diperlukan optimalisasi sinkronisasi dan koordinasi lintas K/L sebagai langkah antisipasi akhir tahun untuk mempercepat proses pelayanan, termasuk pembahasan hal teknis di lapangan.
2. Diperlukan koordinasi untuk mengoptimalkan sistem *risk management* dalam menentukan barang yang memerlukan pemeriksaan fisik dan dokumen secara otomatis dan cepat. Mengurangi intervensi manual yang cenderung memperlambat proses.
3. Monitoring berkala ke PIC masing-masing K/L agar dapat mempercepat proses paraf di internal K/L.

3

Sasaran Program: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan Latar Belakang

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/ layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2025 adalah sebesar 57,25. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun realisasi capaian Triwulan IV 2025 yang diperoleh melalui data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang telah dilakukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan BPS yaitu sebesar 66,64% (mencapai 116%) pada awal semester II Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 3.1. Indeks Literasi Keuangan	Persentase	57,25	66,64*	116%

*) angka realisasi tahunan (tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK Tahun 2025).

Realisasi capaian Triwulan IV ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan	Terlaksana	1. Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas: a. Rapat Koordinasi POKJA I: Edukasi DNKI di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2025 b. Rapat Koordinasi POKJA IV: Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah DNKI di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025

			c. Rapat Koordinasi terkait Akselerasi Percepatan Kepemilikan Akun Bank Berbasis Keluarga di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025
			2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional: a. Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Anggota Koperasi Wanita di Surakarta pada tanggal 23 Januari 2025 b. Creative Talk dan Festival Inklusi Keuangan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-22 Februari 2025
Triwulan II			
1	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Terlaksana	1. Koordinasi awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas. 2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional.
Triwulan III			
1	Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Peningkatan Indeks Literasi Keuangan	Terlaksana	Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Peningkatan Indeks Literasi Keuangan dilakukan melalui kegiatan: 1. Konsultasi Publik RPP Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada 23 Juli 2025 2. Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Binaan Sentra Bimbingan Usaha Kecil Keuskupan Agung Jakarta (Sabuk KAJ) pada 25 Agustus 2025 3. <i>Launching</i> Program Peningkatan Inklusi keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) di Kabupaten Kuningan pada 29 Agustus 2025 4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut kerja Sama Sekretariat DNKI dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait Optimalisasi Edukasi Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi Masyarakat

			Prioritas pada 15 September 2025 5. Audiensi Deputi dengan Bupati Kuningan terkait Tindak Lanjut Program PINTAR di Kabupaten Kuningan pada 17 September 2025
Triwulan IV			
1	Perencanaan Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Keuangan Tahun 2026	Terlaksana	Perencanaan Kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Keuangan Tahun 2026 dilakukan melalui kegiatan: 1. Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 1 Edukasi Keuangan dan Pokja 5 Perlindungan Konsumen) pada 14 Oktober 2025 2. FGD StranasLIK Pokja 1 - Literasi Keuangan pada 11 November 2025 3. FGD StranasLIK Pokja 3 - Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada 12 November 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Adapun upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan "*Official Visit to Indonesia of Vice President of the Swiss Confederation*" ke proyek PROMISE II Impact Pengalangan pada 2 Oktober 2025.
2. Melaksanakan Rakornas TPAKD 2025 pada 10 Oktober 2025.
3. Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif/DNKI (Pokja 2 Hak Properti Masyarakat dan Pokja 7 Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan) pada 14 Oktober 2025.
4. Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 3 Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan) pada 15 Oktober 2025.
5. Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 4) pada 15 Oktober 2025.
6. Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 6 Kebijakan dan Regulasi dan Sekretariat DNKI) 16 Oktober 2025.
7. FGD StranasLIK Pokja 2 - Inklusi Keuangan pada 11 November 2025.
8. FGD StranasLIK Pokja 5 - Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan pada 12 November 2025.
9. FGD StranasLIK Pokja 4 - Kebijakan dan Regulasi pada 13 November 2025.
10. FGD StranasLIK Pokja 6 - Pelindungan Konsumen pada 13 November 2025.

11. FGD StranasLIK Sekretariat pada 14 November 2025.
12. Rapat Tindak Lanjut RPP Komnas LIK pada 5 Desember 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan melalui antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; penguatan struktur DNKI menjadi Komite Nasional terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga koordinasi lintas K/L dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah.

4

Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- (2) Pengembangan Ekspor Nasional
- (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- (4) Pengembangan Ekonomi Digital
- (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektifitas SKP

$$= 5\sqrt{(SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5)}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik) yang diperoleh dari data setiap Keasdepan dan dihitung berdasar rumus.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi

sebesar 3 dengan nilai 81,96 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	3 dari 4	3	100%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon II	Persentase Efektivitas SKP
1	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	80
2	Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	85
3	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	80
4	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	85
5	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	80
Indeks Efektivitas SKP		81,96

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi adalah 81,96 atau sama dengan skala 3 (Efektif). Hal ini dikarenakan sebagian besar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di unit Eselon III Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital masih berada pada tahap ketiga yaitu Koordinasi Formulasi Kebijakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor	Terlaksana	1. Penyampaian Nota Dinas Konfirmasi Kesiapan Kementerian/Lembaga Untuk Perubahan Lartas Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian dan Usulan Pelaksanaan Rakortas Tingkat Menteri terkait Perubahan Lartas Impor sesuai nota dinas nomor PI.02.02/15/D.III.M.EKON/02/2025. 2. Penyampaian Nota Dinas Usulan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Mengenai Perubahan Ketentuan Larangan dan Pembatasan Impor dari Kementerian Perdagangan sesuai nota dinas nomor PI.02.02/11/D.III.M.EKON/02/2025.
2	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Terlaksana	Koordinasi Pembahasan Cyber Security Centre: a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.02.03/11/D.III.M.EKON/03/2025 pada 11 Maret 2025 Perihal Rapat Koordinasi Terkait Cyber Security Centre yang dilaksanakan pada 11 Maret 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: KWU.06.02/03/D.III.M.EKON.5/03/2025; b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.04.02/13/D.III.M.EKON/03/2025 pada 26 Mei 2025 Perihal Undangan Rapat Lanjutan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025;

			Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital: a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/22/D.III.M.EKON.5/02/2025 pada 12 Februari 2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital. Hal ini ditindaklanjuti risalah rapat No: KWU.06.02/20.1/D.III.M.EKON.5/02/2025; b. Koordinasi pengembangan SDM dibidang ekonomi digital juga ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha yang telah menyediakan pelatihan/upskilling/reskilling dibidang digital seperti IBM. Adapun hasil koordinasi ini tercantum dalam Nota Dinas KWU.06.01/15/D.III.M.EKON.5.1/03/2025
Triwulan II			
1	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Terlaksana	Telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi bilateral bersama KL mengenai pembahasan rencana aksi pada pilar 1: strategi penguatan infrastruktur konektivitas, layanan <i>backbone</i>, dan sarana penunjang Logistik; Per tanggal 19 Juni 2025, Renaksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.
2	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Terlaksana	1. Penyelenggaraan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Putusan MA No. 6P/HUM/2024 terkait Permohonan Uji Materiil Terhadap Permendag No. 25 Tahun 2021 sesuai surat PI.04.04/05/D.III.M.EKON.02/03/2025; 2. Penyampaian Laporan Hasil Koordinasi terkait Surat Hardianto Gosali kepada Menko Perekonomian tentang Pemeriksaan/Penyelidikan Dugaan Pelanggaran PT Trive Invest Futures (Pialang Berjangka); 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut surat Dewan Pengurus Pusat ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam

			Kemasan) terkait SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 sesuai undangan nomor PI.04.02/16/D.III.M.EKON.2/06/2025; 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Revisi Permendag No. 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia sesuai undangan nomor PI.04.06/13/D.III.M.EKON.2/05/2025; 5. Penyelenggaraan Diskusi Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (terkait pendaftaran TPP SIR) sesuai undangan nomor PI.04.06/14/D.III.M.EKON.2/05/2025; 6. Penyampaian Nota Dinas Bapak Deputi kepada Bapak Menko Melaporkan Hasil Audiensi dengan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) terkait Perizinan di Ritel Modern.
3	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Terlaksana	Koordinasi pembahasan Cyber Security Centre (lanjutan) a. Koordinasi berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/64 /D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 Perihal Undangan Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula No:B/KWU.06.03/33/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 2 Juni 2025; b. Koordinasi berdasarkan undangan KWU.06.04/55/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti

			dengan Notula No:B/KWU.06.03/29/D.III.M.E KON.5/05/2025 pada 22 Mei 2025; Koordinasi dibidang Inovasi dan Investasi a. Koordinasi pengembangan quantum safe Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/53/D.III.M.EKON.5 /05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 Perihal Workshop Quantum Safe yang dilaksanakan pada 27 Mei 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: B/KWU.06.03/35/D.III.M.EKON .5/06/2025 pada 10 Juni 2025; b. Koordinasi pengembangan quantum computing Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/52/D.III.M.EKON.5 /05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 c. Koordinasi terkait sinkronisasi Satgas AI Komdigi dan Satgas Semikonduktor dan AI yang ditindaklanjuti dengan nota dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/45/D.III.M.EKO N.5/05/2025 pada 14 Mei 2025 Koordinasi Permasalahan Kemitraan Pengemudi Online dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/65/D.III.M.EKON/06/ 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:T/ KWU.06.04/38/D.III.M.EKON/06/ 2025 pada 12 Juni 2025 Koordinasi dukungan kehadiran UMK Binaan dalam FGD Evaluasi Video Edukasi untuk UMK: Perizinan, Perlindungan Konsumen, dan E-Commerce dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/43/D.III.M.EKON/04/ 2025 tertanggal 16 April 2025 Koordinasi dibidang infrastruktur terkait sinkronisasi program kerja infrastruktur ekonomi digital sebagaimana surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
--	--	--	---

			No:KWU.06.01/67/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 5 Juni 2025 Koordinasi dibidang SDM terkait Update Digital Skill Dashboard Project yang direncanakan untuk digabungkan dengan aplikasi digital talent Komdigi sebagaimana yang diselenggarakan pada 16 Mei 2025 dan ditindaklanjuti dengan nota dinas No: KWU.06.01/24.1/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 17 Mei 2025
Triwulan III			
1	Koordinasi High Level Meeting Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel	Terlaksana	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standardisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dilaksanakan dengan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 18 Juli 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
2	Koordinasi High Level Meeting Rekomendasi Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	Terlaksana	Telah terlaksana dengan penyampaian Nota Dinas: 1. Laporan Update Program GASPPoL (Gerakan ASN Pakai Produk Lokal) 2. Laporan Persiapan Kick Off Road to Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 2025 3. Penyampaian Draft Surat Peluncuran HARBOLNAS 2025 4. Laporan Hasil FGD Koordinasi Kebijakan Perpajakan Pusat dan Daerah pada Sektor Ritel
Triwulan IV			
1	Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Terlaksana	Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan dilaksanakan melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang mana Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diamanahkan sebagai Wakil Ketua I Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (<i>Debottlenecking</i>). Tim Satgas P2SP secara berkala mengadakan rapat koordinasi, termasuk pada triwulan IV.

2	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi High Level Meeting Kebijakan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Terlaksana	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan dilaksanakan melalui: 1. Rapat Tindak Lanjut RPP Komnas LIK pada tanggal 5 Desember 2025. 2. Rapat Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) secara daring pada tanggal 29 Desember 2025.
---	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2025 sesuai surat undangan PI.04.02/02/D.III.M.EKON/02/2025.
- Evaluasi Belanja Masyarakat 2024 dan Rencana Program Belanja Masyarakat dan Belanja Pemerintah 2025.
- Evaluasi Program Hari Belanja Online Nasional Tahun 2024.
- Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan *Business Matching* P3DN Tahun 2025 sesuai surat PI.04.02/01/D.III.M.EKON/01/2025.
- Monitoring dan Evaluasi Data Center ke PT DCI Indonesia sebagaimana pada Laporan Nota Dinas Nomor: KWU.06.01/130/D.III.M.EKON.5/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
- Kunjungan Kerja terkait Perdagangan Besar dan Eceran Ke KADIN Kota Surakarta, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, BPS Provinsi Sumatera Barat, Disperindag Provinsi Sumatera Barat dan Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Keterlambatan penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang mana didalamnya berisikan renaksi terkait konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat dan laut, karena proses birokrasi di K/L yang bertanggung jawab untuk melakukan paraf draf Perpres cukup lambat dan panjang.
- Terjadinya efisiensi anggaran di K/L terkait sehingga koordinasi beberapa rencana kebijakan sulit untuk diimplementasikan.
- Sistem *National Logistic Ecosystem* (NLE) belum sepenuhnya terpadu. K/L memiliki sistem digital masing-masing namun belum terintegrasi secara mulus.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

- Monitoring berkala ke K/L penanggung jawab paraf agar dapat mempercepat proses paraf di masing-masing internal K/L.
- Perubahan pelaksanaan rencana rapat koordinasi yang sebelumnya fisik menjadi melalui media daring.
- Mempercepat penerbitan RPerpres Penguatan Logistik Nasional agar dapat segera diterapkan di masing-masing K/L. Diharapkan dapat membantu peningkatan penguatan sistem logistik nasional di Indonesia.

5**Sasaran Program: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5}) / 5$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik). Adapun target triwulan IV 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Pada triwulan IV tahun 2025, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 3,43 atau mencapai 114% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (baik)	3,43 (baik)	114%

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit: Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten

Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon 2	Indeks Kepuasan Semester II
1	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3,59 (Puas)
2	Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	3 (Puas)
3	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	3,35 (Puas)
4	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	3,63 (Puas)
5	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	3,56 (Puas)
Rata-rata		

Pada triwulan IV tahun 2025, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital **diperoleh nilai rata-rata Indeks 3,43 (Puas)** dengan jumlah responden di unit eselon II masing-masing sebanyak 30 orang yang tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Google, IBM, Meta, Huawei, dan Microsoft.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.2. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Memberikan Arahan Penyusunan Kuesioner Pengukuran Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan II			

1	Memberikan Arahan Pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	Arahan pelaksanaan survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan III			
1	Memberikan Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
2	Memberikan Arahan Persiapan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Terlaksana	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan IV			
1	Memberikan Arahan Pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Terlaksana	Arahan pelaksanaan survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan Rencana Aksi sepanjang TW IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam pelaksanaan survei dan surat pengantar secara daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti adanya pergantian atau pembaruan mitra kerja (pejabat/unit kerja) yang menjadi sasaran layanan koordinasi yang berpotensi memengaruhi hasil survei. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, beberapa opsi upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu membuat daftar unit kerja beserta nama pejabat yang akan dijadikan responden lintas Asdep.

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. **Persentase Latar Belakang**

Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV);
2. Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV);
3. Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

% Pelaksanaan Renaksi RB

= (Total Renaksi RB yang dilaksanakan: Total Renaksi RB yang dirumuskan) x 100%

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan IV 2025 adalah sebesar 85%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 117,65% dari target Triwulan IV Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi Tahunan	% Kinerja
IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	85%	100%	100%	117,65% (Memuaskan)

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebesar 100% dari target 85% pada tahun 2026. Pemenuhan target menunjukkan Renaksi RB yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh Renaksi RB yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	telah terlaksana Rapat Internal Lingkup Kedeputian III pembahasan persiapan penetapan perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025. selanjutnya, Draft

			penyusunan perjanjian kinerja Lingkup Kedeputian III Tahun 2025 dilaksanakan pada Triwulan II.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2025.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.
Triwulan II			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-II 2025.
2	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Penguatan persiapan pengawasan kearsipan internal lingkup Kedeputian III dilakukan melalui pendampingan pengelolaan arsip aktif telah dilaksanakan bersama Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan diwakilkan oleh Sekretaris Deputi pada tanggal 27 Mei 2025.
Triwulan III			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan-III 2025 telah dilaksanakan.
2	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan dengan secara aktif surat keluar dilakukan melalui Srikandi.
Triwulan IV			
1	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV)	Terlaksana	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV) telah dilaksanakan melalui dialog kinerja internal Deputi 3 yang dipimpin oleh Deputi pada 14 Oktober 2025.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan dan telah dilakukan pelaporan pada web Ekon-GO dan melalui Nota Dinas kepada Plt Kepala Biro MKKS.
3	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah dilaksanakan dialog kinerja tanggal 8 Desember 2025.

4	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan berupa pemanfaatan aplikasi SRIKANDI untuk surat keluar dan masuk.
---	-----------------------------------	------------	---

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Pada Triwulan IV ini telah dilaksanakan kegiatan lainnya seperti Rapat Pimpinan yang membahas program dan anggaran di unit Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk rapat secara fisik atau melakukan rapat secara daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan IV Tahun 2025, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu aplikasi SRIKANDI yang sering tidak merespon/respon lama sehingga mengganggu aktivitas pemrosesan surat.

Berdasarkan kendala tersebut, beberapa upaya yang dilakukan seperti melakukan pemrosesan surat melalui media komunikasi lain seperti *e-mail* maupun aplikasi pesan elektronik lainnya. Kemudian memitigasi tugas mendadak dengan sosialisasi aplikasi Srikandi di gawai pegawai, sehingga notifikasi disposisi dapat segera disampaikan.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon